

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi menjadi faktor yang tak terpisahkan, merambah ke berbagai sektor, mulai dari administrasi pemerintahan hingga kehidupan sehari-hari masyarakat (Mahardika, 2018). Oleh karena itu, di era transformasi digital ini integrasi teknologi dalam pemerintahan menjadi suatu keharusan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perkembangan pesat dalam informasi dan komunikasi telah menjadikan era digital sebagai zaman di mana akses terhadap informasi semakin luas, bahkan hingga ke pelosok desa. Kemajuan di bidang telekomunikasi membawa internet sebagai alat utama dalam berbagai aspek kehidupan, memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Dalam konteks pembangunan daerah, perkembangan teknologi menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Inovasi digital yang terus berkembang mendorong masyarakat untuk beradaptasi agar tidak tertinggal dalam arus perubahan (Nursyahidah et al., 2021).

Dengan demikian, daya saing menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan desa yang berkelanjutan. Semakin tinggi daya saing suatu daerah, semakin besar pula peluang masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Namun, setiap daerah memiliki respons yang berbeda terhadap dampak globalisasi. Banyak orang masih beranggapan bahwa kota lebih maju, modern, dan sejahtera dibandingkan desa. Padahal, desa juga memiliki potensi besar sebagai pilar pembangunan nasional. Jika dikelola dengan baik, keberhasilan pembangunan desa dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya pembangunan nasional di berbagai sektor dengan tujuan menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera, berkeadilan, serta memiliki daya saing tinggi. Salah satu prioritas dalam tujuh agenda pembangunan yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah pengembangan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan memastikan pemerataan pembangunan.

Namun, ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan besar, salah satunya terlihat dari tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di perdesaan dibandingkan perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk miskin di desa mencapai 26.590 jiwa, sedangkan di perkotaan angka tersebut lebih rendah, yakni 22.684 jiwa (BPS, 2024). Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Data Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi dan Daerah di Indonesia

Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah di Indonesia				
Provinsi	Perkotaan		Perdesaan	
	2024		2024	
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
Aceh	190,55	168,71	613,98	550,25
Sumatera Utara	697,46	623,78	530,55	487,14
Sumatera Barat	139,12	125,69	206,62	189,75
Riau	200,91	183,28	291,34	289,76
Jambi	118,39	120,63	147,03	152,08
Sumatera Selatan	342,34	310,04	641,9	638,81
Bengkulu	94,67	86,71	186,69	174,44
Lampung	244,04	239,51	697,19	699,8
Kep. Bangka Belitung	30,4	37,09	39,55	41,49
Kep. Riau	112,28	102,23	26,03	22,72
Dki Jakarta	464,93	449,07	-	-
Jawa Barat	2921,52	2780,46	927,15	887,89
Jawa Tengah	1835,51	1683,75	1868,82	1712,59
Di Yogyakarta	319,4	316,81	126,15	113,66
Jawa Timur	1642,69	1589,12	2339,99	2304,7
Banten	615,07	606,52	176,54	170,98
Bali	119,31	112,93	65,12	63,29
Nusa Tenggara Barat	368,54	338,74	340,47	319,86

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah di Indonesia				
Provinsi	Perkotaan		Perdesaan	
	2024		2024	
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
Nusa Tenggara Timur	131,61	126,91	995,96	981,02
Kalimantan Barat	85,94	94,82	250,14	239,17
Kalimantan Tengah	60,17	65,34	85,46	83,9
Kalimantan Selatan	80,92	81,22	102,39	98,98
Kalimantan Timur	118,44	118,19	102,9	93,69
Kalimantan Utara	23,18	25,06	24,65	16,05
Sulawesi Utara	67,89	59,45	118,97	113,85
Sulawesi Tengah	91,92	79,85	287,84	278,48
Sulawesi Selatan	219,65	228,59	516,83	483,17
Sulawesi Tenggara	82,61	75,77	237,1	229,5
Gorontalo	25,46	28,49	152,53	141,54
Sulawesi Barat	27,24	24,55	134,95	131,36
Maluku	41,47	38,83	256,21	255,16
Maluku Utara	23,41	24,21	59,68	55,48
Papua Barat	12,82	15,18	97,34	93,11
Papua Barat Daya	24,04	22,96	78,23	73,85
Papua	33,68	31,85	119,24	129,21
Papua Selatan	5,97	7,14	86,23	95,88
Papua Tengah	10,92	13,47	297,56	274,06
Papua Pegunungan	12,92	9,64	352,51	321,48
Total	11637,37	11046,59	13581,84	13008,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Data Diolah Oleh Peneliti, 2025)

Fenomena kemiskinan banyak menyebabkan banyak penduduk desa yang pindah ke kota, yang pada gilirannya menurunkan kesejahteraan di pedesaan. Saat ini, proses urbanisasi ini terjadi dengan kecepatan 1,2 persen per tahun (Bahirah, 2022).

Dalam konteks tersebut, konsep *Smart Village* muncul sebagai solusi inovatif untuk mengakselerasi pembangunan desa melalui pemanfaatan teknologi (Nunsina et al., 2021). Berbeda dengan *smart city*, pendekatan ini menekankan adaptasi teknologi sesuai karakteristik lokal, seperti adat

istiadat dan potensi ekonomi desa.

Konsep *Smart Village* sendiri menekankan enam pilar utama yang saling berkaitan, yaitu *smart economy*, *smart governance*, *smart mobility*, *smart environment*, *smart living*, dan *smart people* (Giffinger, 2010). Di antara pilar tersebut, *Smart People* menempati posisi strategis karena menjadi pondasi dari keberhasilan pilar lainnya. Smart People mencakup kualitas sumber daya manusia (SDM), tingkat literasi digital, keterampilan teknologi, serta sikap adaptif masyarakat dalam menerima perubahan. Tanpa masyarakat yang memiliki kapasitas dan kesiapan digital, maka pembangunan infrastruktur teknologi di desa hanya akan menjadi kebijakan simbolik tanpa memberikan manfaat nyata. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 18,3% pengguna internet di wilayah tertinggal yang pernah mendapatkan pelatihan literasi digital (Jatmiko, 2024). Fakta ini memperlihatkan betapa masih rendahnya kapasitas masyarakat desa dalam mengoptimalkan teknologi untuk mendukung aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik.

Upaya pengembangan *Smart Village* di Indonesia sebenarnya sejalan dengan program pemerataan akses digital yang telah dijalankan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hingga tahun 2023, lebih dari 70% desa di Indonesia telah terhubung dengan akses internet, namun distribusinya belum merata. Masih terdapat sekitar 20% desa yang mengalami kesulitan dalam memperoleh koneksi internet yang stabil dan cepat (Nara, 2025). Kesenjangan ini tentu memengaruhi efektivitas implementasi *Smart Village*, karena jaringan internet merupakan prasyarat utama dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital di pedesaan.

Selain persoalan konektivitas, tingkat literasi digital masyarakat desa juga masih menjadi tantangan. Menurut survei APJII tahun 2024, 33,2% masyarakat desa mengeluhkan sinyal yang tidak stabil, 18,8% menyebut perangkat yang tidak memadai, dan 11,2% mengaku kurang memiliki

pengetahuan dalam menggunakan internet (Jatmiko, 2024). Data ini memperlihatkan bahwa keterbatasan perangkat dan rendahnya literasi digital bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga menyangkut kesiapan masyarakat sebagai pengguna teknologi. Tanpa peningkatan literasi digital, masyarakat sulit memanfaatkan teknologi secara optimal, baik untuk kebutuhan administrasi, pendidikan, maupun kegiatan ekonomi.

Dalam kerangka pembangunan desa, literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup pola pikir dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial yang ditimbulkan oleh teknologi. Hal ini sesuai dengan konsep *Smart People* yang merupakan bagian dari *Smart Village* menuntut masyarakat untuk tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya untuk meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses informasi, serta mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel (Panda.id, n.d.).

Studi empiris menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *Smart Village* sangat dipengaruhi oleh faktor manusia. Desa-desanya yang dipimpin oleh kepala desa berusia muda, berpendidikan sarjana, serta memiliki perangkat desa yang kompeten, umumnya lebih berhasil dalam memanfaatkan Dana Desa untuk program digitalisasi. Sebaliknya, desa-desanya dengan kepemimpinan konvensional yang minim wawasan teknologi cenderung tertinggal (Reddit, 2025). Fakta ini menguatkan bahwa *Smart People*, baik dari sisi pemerintah desa maupun masyarakatnya, merupakan penentu utama keberhasilan *Smart Village*.

Dalam ranah lokal, Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang mulai mendorong implementasi program *Smart Village* sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Kecamatan Cicalengka, yang terdiri dari sejumlah desa termasuk Desa Waluya, menjadi bagian dari sasaran kebijakan ini. Pemerintah daerah menekankan bahwa digitalisasi desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses

masyarakat terhadap informasi, serta mendorong penguatan ekonomi lokal berbasis digital. Namun, capaian tersebut masih menghadapi berbagai kendala implementasi di lapangan, khususnya pada kesiapan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan desa.

Desa Waluya, sebagai lokasi penelitian, menunjukkan adanya potensi sekaligus tantangan dalam implementasi *Smart Village*. Potensinya terletak pada dukungan kebijakan desa serta adanya inisiatif digitalisasi dalam layanan publik. Desa Waluya memiliki potensi besar untuk mengembangkan inisiatif ini. Sejak pemekarannya pada tahun 1983, desa ini telah mengalami perubahan signifikan dari sektor pertanian ke sektor industri, mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Implementasi *smart village* di Desa Waluya sendiri merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun mengenai transformasi digital sendiri sudah dimulai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa. Pergub ini menekankan pentingnya penyelenggaraan gerakan membangun desa yang tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan kapasitas masyarakat dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup di desa.

Namun, tantangan muncul pada aspek *Smart People*, di mana sebagian besar masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang memadai tentang penggunaan teknologi digital. Hal tersebut diperoleh dari hasil observasi peneliti, dalam mewujudkan implementasi program *smart village* dalam pilar *Smart People* di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Berikut penjelasannya:

Pertama, penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS masih rendah karena keterbatasan perangkat, akses internet, serta kurangnya

kepercayaan masyarakat terhadap sistem baru tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa kendala utama tidak hanya terletak pada infrastruktur, tetapi juga pada aspek kesadaran dan keterampilan masyarakat. Keterbatasan sumber daya kebijakan juga terlihat dalam hal akses perangkat digital. Masih banyak warga Desa Waluya yang tidak memiliki smartphone atau perangkat pendukung lainnya, sehingga mereka kesulitan mengakses layanan digital yang ditawarkan pemerintah desa. Selain itu, pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat juga belum berjalan optimal karena keterbatasan staf desa yang memiliki kompetensi digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sumber daya manusia, baik dari kalangan masyarakat maupun aparatur desa, masih menjadi tantangan serius dalam mendorong terwujudnya *Smart People* di Desa Waluya.

Kedua, berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap perubahan. Sebagian besar masyarakat Desa Waluya menunjukkan resistensi terhadap kebijakan digitalisasi, karena lebih nyaman menggunakan cara tradisional dalam bertransaksi maupun berinteraksi dengan pemerintah desa. Misalnya, dalam konteks pembayaran, warga masih lebih memilih uang tunai dibandingkan dengan metode pembayaran digital. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi belum sepenuhnya diterima sebagai kebutuhan, melainkan dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan kebiasaan lama.

Ketiga, kecenderungan sebagian besar masyarakat untuk mempertahankan pola hidup tradisional menjadi hambatan besar dalam penguatan *Smart People*. Minimnya kemauan untuk berubah sering kali berakar pada kurangnya pemahaman manfaat teknologi, minimnya sosialisasi, serta ketidakpercayaan terhadap sistem digital. Hal ini memperburuk kondisi karena meskipun pemerintah desa sudah berusaha melakukan digitalisasi, masyarakat yang tidak siap akan tetap menolak atau enggan memanfaatkan layanan tersebut. Oleh karena itu, sikap masyarakat sebagai implementor kebijakan menjadi faktor penentu dalam efektivitas

Smart Village di Desa Waluya.

Keempat, kondisi sosial-ekonomi juga turut memengaruhi kesiapan *Smart People* di Desa Waluya. Kepemilikan perangkat digital dianggap bukan sebagai kebutuhan prioritas. Faktor biaya internet yang cukup tinggi dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga juga membuat akses terhadap teknologi digital menjadi terbatas. Hal ini sejalan dengan temuan survei APJII bahwa 14,4% masyarakat desa menganggap biaya internet menjadi penghalang utama dalam mengakses layanan digital (Jatmiko, 2024).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, masih adanya permasalahan dalam pengimplementasian program *smart village* dalam pilar *Smart People* di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Berikut penjelasannya:

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa implementasi *Smart Village* di Desa Waluya masih menghadapi berbagai tantangan serius pada aspek *Smart People*, baik dari segi keterbatasan sumber daya, resistensi masyarakat, maupun kondisi sosial-ekonomi yang membatasi adopsi teknologi. Jika tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan literasi digital dan mengubah pola pikir masyarakat, maka kebijakan *Smart Village* akan sulit berjalan optimal. Dengan kata lain, tantangan terbesar bukan pada teknologi itu sendiri, melainkan pada kualitas dan kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana implementasi program *Smart Village* dilakukan dan sejauh mana hal tersebut dalam mewujudkan atau mendorong implementasi adanya *smart village* khususnya dalam pilar *smart people* di Desa Waluya. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini yaitu “Implementasi Program *Smart Village* Dalam Mewujudkan Transformasi Digital Di Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung” dirasa tepat untuk menjawab tantangan dan kebutuhan tersebut, dengan harapan mampu memberikan

rekomendasi konkret guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa berbasis digital di wilayah ini.

Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek infrastruktur digital dalam implementasi *Smart Village*, seperti ketersediaan jaringan internet dan perangkat. Namun, kajian yang secara khusus mengulas pilar *Smart People* masih terbatas, khususnya yang membahas bagaimana sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat memengaruhi efektivitas kebijakan digitalisasi. Di Desa Waluya, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi, yaitu bagaimana keterbatasan sumber daya kebijakan (akses perangkat dan literasi digital) serta kecenderungan pelaksana (resistensi terhadap perubahan) memengaruhi implementasi *Smart Village*. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai tantangan penguatan *Smart People* dalam konteks desa, sekaligus merumuskan strategi yang relevan agar program *Smart Village* dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah, peneliti merumuskan menjadi beberapa point utama, yaitu :

1. Bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan pada implementasi program *smart village* dalam Pilar *Smart People* di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana sumber daya kebijakan pada implementasi program *smart village* dalam Pilar *Smart People* di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana komunikasi antar organisasi pada implementasi program *smart village* dalam Pilar *Smart People* di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana karakteristik badan pelaksana pada implementasi program *smart village* dalam Pilar *Smart People* di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?

5. Bagaimana kecenderungan pelaksana (implementor) pada implementasi program *smart village* dalam Pilar *Smart People* di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
6. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada implementasi program *smart village* dalam Pilar *Smart People* di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan sumber daya kebijakan dalam mengimplementasikan program *smart village* dalam Pilar *Smart People* di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui sumber daya kebijakan dalam mengimplementasikan program *smart village* dalam Pilar *Smart People* di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui komunikasi antar organisasi dalam mengimplementasikan program *smart village* dalam Pilar *Smart People* di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui karakteristik badan pelaksana dalam mengimplementasikan program *smart village* dalam Pilar *Smart People* di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui kecenderungan pelaksana (implementor) dalam mengimplementasikan program *smart village* dalam Pilar *Smart People* di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
6. Untuk mengetahui kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam mengimplementasikan program *smart village* dalam Pilar *Smart People* di Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik pada aspek ilmiah dan aspek sosial, dan juga penelitian ini

dapat berkontribusi sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Kegunaan kontribusi pada aspek ilmiah dan aspek sosial dijelaskan pada pemaparan berikut ini

1. Kegunaan ilmiah (Signifikasi Akademik)

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah akademik dalam bidang administrasi publik dengan meningkatkan pemahaman terkait implementasi program pada organisasi sektor publik. Penelitian ini pun diharapkan menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika yang terjadi pada Desa Waluya terkait pengimplementasian program *smart village* dalam dalam Pilar *Smart People*. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi referensi yang berharga untuk penelitian selanjutnya yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada program pengelolaan persampahan.

2. Kegunaan sosial (Signifikasi Praktis)

Secara praktis hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi Desa Waluya dalam meningkatkan implementasi pada program *smart village* dalam Pilar *Smart People*. Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan pelaksanaan program tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif. Penelitian ini diharapkan pula memberikan kontribusi dalam mendorong kebijakan yang lebih baik serta mewujudkan keadilan bagi semua orang tanpa memandang status sosial.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, dengan tujuan merealisasikan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, implementasi kebijakan

merupakan serangkaian tindakan dan upaya yang dilakukan oleh aktor pelaksana guna mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada proses interpretasi kebijakan, pengorganisasian yang tepat, serta penerapan yang efektif. Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut secara sistematis, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dirancang tidak hanya sebatas konsep, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengacu pada teori Pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Situmorang, 2016), yang mengemukakan bahwa ada enam variabel utama yang mempengaruhi hubungan antara kebijakan dan pencapaiannya (*performance*). Pendekatan tersebut tidak hanya menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang saling terkait, tetapi juga memberikan hipotesis yang dapat diuji melalui penelitian empirik. Berikut adalah enam variabel tersebut:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- 2) Sumber Daya Kebijakan
- 3) Komunikasi Antar Organisasi
- 4) Karakteristik Badan Pelaksana
- 5) Kecenderungan Pelaksana (Implementor)
- 6) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Maka dari itu peneliti membuat skema kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan variabel terkait dengan masalah penelitian beserta teorinya, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dipaparkan dalam skema berikut:

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



Sumber: (Data Diolah Peneliti, 2025)